



## **IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA di DESA PAAN WARU KECAMATAN ELAR SELATAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

**Prisarina Arin, Dr.Hendrik Toda, S.Sos M.Si, Alfred O. Ena Mau, S.Sos., M.Si**

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana

### **ARTICLE INFO**

#### **Article history:**

Received Agustus, 2025

Revised Agustus, 2025

Accepted Agustus, 2025

Available online Agustus , 2025

[Prisarinaarin50@gmail.com](mailto:Prisarinaarin50@gmail.com)

[hendrik.toda2012@gmail.com](mailto:hendrik.toda2012@gmail.com)

[allenamau@gmail.com](mailto:allenamau@gmail.com)

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas  
Pendidikan Ganesha.

### **ABSTRAK**

Desa Paan Waru merupakan salah satu desa di kecamatan Elar Selatan yang masih tergolong dalam desa tertinggal. Hal ini ditandai dengan kurangnya infrastuktur terutama jalan sebagai penunjang kemajuan dalam sebuah desa. Jalur akses jalan dan transportasi di Desa Paan Waru sangat memprihatinkan dimana terdapat banyak jalan yang berlobang sehingga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Dengan melihat permasalahan yang ada pada tahun 2020 pemerintah Desa Paan Waru membuat rencana kerja salah satunya adalah pembangunan jalan desa tujuannya agar masyarakat lebih mudah untuk mengakses berbagai fasilitas seperti pusat kesehatan, sekolah dan pasar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi program pembangunan infrastruktur jalan desa di Desa Paan Waru

Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari George Edward III. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara yang mendalam. Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi program pembangunan jalan sudah dilakukan dengan baik dan juga sudah melibatkan masyarakat dari proses pengambilan keputusan pembangunan sampai pada proses pengerjaannya. Hal ini dapat dilihat dari pemerintah desa telah melakukan perencanaan yang matang dan komprehensif, meliputi studi kelayakan, penganggaran yang terukur, dan penentuan spesifikasi teknis yang jelas, pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dilakukan secara ketat dan berkelanjutan serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

**Kata Kunci :** implementasi pembangunan , infrastruktur jalan

### **ABSTRACT**

*Paan Waru Village is one of the villages in South Elar sub-district which is still classified as a disadvantaged village. This is characterized by a lack of infrastructure, especially roads, to support progress in a village. Road access and transportation in Paan Waru Village are very worrying, where there are many potholes in the roads which can slow down the economic*



---

*growth of the local community. By looking at the problems that existed in 2020, the Paan Waru Village government made a work plan, one of which was the construction of village roads with the aim of making it easier for the community to access various facilities such as health centers, schools and markets. The aim of this research is to describe the implementation of the village road infrastructure development program in Paan Waru Village, South Elar District, East Manggarai Regency.*

*The theory used in this research is the theory of George Edward III. This research uses qualitative methods by collecting data through in-depth observation and interviews. The research results found that the implementation of the road construction program had been carried out well and had also involved the community from the development decision making process to the construction process. This can be seen from the village government having carried out thorough and comprehensive planning, including feasibility studies, measurable budgeting, and determining clear technical specifications, monitoring of development implementation in a strict and sustainable manner as well as community involvement in the development process.*

**Keywords:** *Development implementation, road infrastructure*

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita suatu negara meningkat secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi meliputi berbagai aspek perubahan dalam kegiatan ekonomi, maka ukuran taraf pembangunan ekonomi yang dicapai suatu negara tidak mudah diukur secara kuantitatif. Berbagai jenis data perlu dikemukakan untuk menunjukkan prestasi pembangunan yang dicapai suatu negara (Sadono Sukirno, 2011). Perekonomian suatu daerah jika didukung dengan pelayanan infrastruktur yang baik, maka perekonomian suatu daerah tersebut akan mengalami peningkatan yang sangat cepat. Selain itu barang dan jasa yang dihasilkan akan menjadi lebih baik (Hadi Wahyono, 2006).

Implementasi kebijakan ialah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijakan Metter dan Horn Agustino, (2006:139). Implementasi kebijakan sangat penting dalam pembangunan infrastruktur di suatu daerah. Implementasi kebijakan pada sektor pembangunan infrastruktur diharapkan akan semakin tumbuh dan struktur tersebut akan lebih menargetkan wilayah desa.

Dampak dari pertumbuhan infrastruktur ini akan memberikan pengaruh signifikan pada sektor ekonomi di daerah tersebut. Selain itu pertumbuhan pembangunan infrastruktur juga akan mempengaruhi pola pikir dan cara berpolitik masyarakat desa, mendorong mereka untuk menetapkan kehidupan berpolitik dan demokrasi di wilayah tersebut.

Keberadaan infrastruktur yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan.



---

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa infrastruktur merupakan modal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendukung kegiatan di berbagai bidang. Disamping sebagai alat yang dapat menghubungkan antar daerah, infrastruktur yang biasa sering disebut sebagai sarana dan prasarana fisik ini, memiliki keterkaitan yang kuat dengan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Tujuan adanya pembangunan terhadap desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tujuan lain yang dapat diperoleh adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa tersebut. Dengan begitu diharapkan, masyarakat dapat terhindar dari kemiskinan. Kemiskinan dapat terjadi pada seseorang, jika kebutuhan dasar masyarakat tidak terpenuhi. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana bagi sebuah desa dan kurangnya pemaksimalan potensi yang dimiliki desa serta masyarakat yang tidak dikelola dengan baik dapat memperburuk keadaan masyarakat desa.

Desa Paan Waru merupakan salah satu desa di kecamatan Elar Selatan yang masih tergolong dalam desa tertinggal. Hal ini ditandai dengan kurangnya infrastuktur terutama jalan sebagai penunjang kemajuan dalam sebuah desa. Jalur akses jalan dan transportasi di Desa Paan Waru sangat memprihatinkan dimana terdapat banyak jalan yang berlobang sehingga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Dengan melihat permasalahan yang ada pada tahun 2020 pemerintah Desa Paan Waru membuat rencana kerja salah satunya adalah pembangunan jalan desa tujuannya agar masyarakat lebih mudah untuk mengakses berbagai fasilitas seperti pusat kesehatan, sekolah dan pasar. Dalam rencana kerjanya pemerintah Desa Paan Waru telah menetapkan anggaran untuk pembangunan jalan desa sebesar Rp 485.734.000 dengan luas jalan 3m dan panjangnya mencapai 1,6 kilometer serta waktu pelaksanaan 3 bulan 15 hari mengingat kondisi geografisnya yang sulit dan keterbatasan sumber daya.

Namun pada pelaksanaannya, pembangunan jalan hanya berlangsung dua bulan yaitu bulan Oktober hingga bulan Desember tahun 2020 dan jalan yang berhasil dibangun hanya memiliki panjang 695,8 meter serta dana yang dialokasikan untuk pembangunan jalan tersebut telah habis untuk pembangunan jalan. Oleh sebab itu maka pembangunan jalan tidak dilanjutkan lagi karena kendala dana desa yang telah habis tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam implementasi program pembangunan infrastruktur jalan desa ada beberapa masalah yang dihadapi seperti 1) Komunikasi yaitu keterbatasan dalam penyampaian informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat dan kesulitan dalam menyampaikan masukan atau keluhan dari masyarakat kepada pemerintah desa. 2) Sumber daya yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia dan keterbatasan akses transportasi. 3) Disposisi yaitu kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat setempat serta kontaktor. 4) Struktur birokrasi yaitu kurangnya transparansi dan akuntabilitas serta prosedur yang rumit dalam perizinan, perencanaan, dan pelaksanaan program jalan desa sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.

Adapun salah satu kendala paling utama dalam pembangunan infrastruktur jalan desa di Desa Paan Waru adalah alokasi dana desa. Dana desa merupakan sumber pendanaan yang vital untuk berbagai inisiatif pembangunan, termasuk pembangunan jalan. Terutama pembangunan



---

jalan tersebut dilaksanakan pada saat pandemi covid 19 sehingga pemerintah desa dituntut untuk memprioritaskan penggunaan dana desa dengan bijak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berdampak. Akibatnya proyek pembangunan jalan tersebut belum ada lanjutan sampai sekarang. Penundaan pekerjaan jalan desa tersebut dari bulan desember tahun 2020 sampai sekarang. Menurut informasi yang diketahui peneliti pembangunan jalan akan dilanjutkan tahun 2024.

Program pembangunan jalan desa ini dikerjakan oleh pemerintah desa bersama dengan kontraktor yang dipilih melalui proses pengadaan. Pemerintah Desa bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengawasi proyek, sementara kontraktor bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan fisik jalan sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan. Kontraktor yang dipilih oleh Pemerintah Desa yaitu berasal dari CV Angkasa Putra. Meskipun program pembangunan jalan desa ini telah direncanakan dengan baik, implementasinya tidak berjalan sesuai harapan. Masalah utama terletak pada pelaksanaannya. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap ini termasuk kurangnya koordinasi yang efektif antara pemerintah desa dan kontraktor, penundaan dalam pengadaan bahan, dan kurangnya pemahaman tentang standar dan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, kontraktor yang dipilih melalui proses pengadaan ternyata tidak memiliki kualifikasi dan pengalaman yang cukup, yang berdampak negatif pada kualitas dan kecepatan pembangunan. Akibatnya, proyek ini mengalami penundaan dan kualitas jalan yang dibangun tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini adalah bukti nyata bahwa implementasi program ini perlu ditingkatkan dan diperbaiki untuk memastikan bahwa tujuan dan manfaat yang diharapkan dapat tercapai.

Seharusnya dalam implementasi kebijakan program pembangunan infrastruktur jalan pemerintah desa harus memperhatikan hal berikut: 1) Perencanaan yang matang yaitu dimana ini melibatkan survei lapangan untuk menilai kondisi tanah dan lingkungan sekitar, analisis kebutuhan dan prioritas masyarakat serta pembuatan rencana desain yang sesuai. 2) Konsultasi dengan stakeholder yaitu melibatkan warga desa, pemimpin lokal, ahli teknis dan kontraktor dalam proses perencanaan untuk mendapatkan masukan dan memastikan dukungan semua pihak terkait. 3) Pengelolaan resiko yaitu identifikasi dan kelola risiko-risiko yang mungkin muncul selama pembangunan jalan, seperti cuaca buruk, perubahan kebijakan, atau masalah tanah, sediakan rencana cadangan dan strategi mitigasi yang tepat. 4) Pemilihan kontraktor yang kompeten yaitu pilih kontaktor yang memiliki pengalaman dan kredibilitas dalam pembangunan jalan. 5) Pengawasan dan manajemen proyek yang ketat yaitu dilakukan pengawasan dan manajemen proyek yang ketat untuk memastikan bahwa pembangunan jalan berjalan sesuai dengan rencana, anggaran dan jadwal yang telah ditetapkan. 6) Penggunaan teknologi dan inovasi yaitu memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam pembangunan jalan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas dan keamanan proyek. 7) Komunikasi dan partisipasi masyarakat yaitu berkomunikasi secara terbuka dengan warga desa tentang kemajuan proyek, masalah yang muncul, dan langkah-langkah yang diambil. Libatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan dan pertimbangan yang berkaitan dengan pembangunan jalan.

Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, implementasi kebijakan pembangunan jalan desa di Desa Paan Waru seharusnya bisa berjalan lebih efektif dan efisien.



---

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus penelitian ini adalah bagaimana implementasi program pembangunan infrastruktur jalan desa di Desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mendeskripsikan implementasi program pembangunan infrastruktur jalan desa di Desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh mengenai Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Paan Waru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur. Data dikumpulkan melalui pengamatan mendalam, wawancara, serta analisis dokumen yang relevan. Fokus penelitian ini adalah pada implementasi program pembangunan jalan desa, dengan menggunakan teori Edwar III sebagai kerangka analisis yang mencakup empat aspek utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Paan Waru dan melibatkan informan yang terdiri dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sekretaris Desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat sebagai penerima manfaat langsung dari program pembangunan jalan desa.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati implementasi program, wawancara bertujuan untuk menggali informasi dari informan kunci, dan dokumentasi mengumpulkan bukti dari hasil observasi dan wawancara. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan menggambarkan data yang terkumpul dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan tersebut. Untuk memastikan validitas temuan, dilakukan uji kredibilitas data menggunakan teknik triangulasi sumber, yang menguji data melalui berbagai sumber yang berbeda. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan desa di Desa Paan Waru dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## **HASIL DAN PENELITIAN**

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang peneliti lakukan terkait kebijakan pembangunan jalan desa yang dilakukan Pemerintah Desa Paan Waru pada tahun 2020 belum dikatakan baik, dimana pembangunan jalan desa tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Kebijakan pembangunan jalan desa dibuat berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yaitu penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang tersebut pemerintah Desa Paan Waru melaksanakan program pembangunan jalan di Dusun Mbong tepatnya di Munting pada tahun 2020. Program ini meliputi pembangunan jalan sepanjang 1,6 kilometer dengan lebar 3 meter, dengan anggaran sebesar Rp 485.734.000. Pelaksanaan proyek ini berlangsung dari tanggal 6 April hingga 15 Juni 2020. Tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan akses



---

bagi masyarakat. Namun pada pelaksanaannya anggaran tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk pembangunan jalan karena anggaran tersebut sebagian dialokasikan pada bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak covid, sehingga prmbangunan jalan desa di hentikan.

Oleh karena itu untuk meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi serta sejauh mana implementasi program pembangunan jalan di Desa Paan Waru peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George Edward III (1984;10) yang mengajukan empat faktor atau variabel yang dapat menentukan atau mempengaruhi berhasil atau tidak berhasilnya implementasi suatu kebijakan publik yakni komunikasi, sumber daya, diposisi dan struktur birokrasi.

Komunikasi yang efektif memegang peranan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, terutama dalam proyek pembangunan infrastruktur seperti jalan desa. Komunikasi yang jelas dan tepat waktu memungkinkan pemahaman yang tepat tentang tujuan dan sasaran kebijakan, serta memperkuat koordinasi antara pelaksana dan masyarakat. Dengan komunikasi yang baik, informasi yang disampaikan akan dapat diterima dengan baik oleh semua pihak terkait, meminimalkan distorsi, dan mengurangi kesalahpahaman. Sebaliknya, komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kebingungan, penolakan, dan bahkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks pembangunan jalan desa, komunikasi yang baik tidak hanya mencakup sosialisasi proyek dan koordinasi antar pihak terkait, tetapi juga pengelolaan keluhan masyarakat serta evaluasi pasca-konstruksi.

Penyampaian informasi yang jelas dan transparan sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak, baik pelaksana maupun masyarakat, memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan pelaksanaan proyek. Berdasarkan hasil penelitian, penyampaian informasi mengenai pembangunan jalan dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang melibatkan seluruh masyarakat. Proses ini memastikan bahwa informasi yang diberikan diterima dengan baik dan masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan. Dalam wawancara dengan Kepala Desa, dijelaskan bahwa informasi terkait pembangunan jalan telah disampaikan melalui APBDes dan musyawarah desa, yang membuka ruang partisipasi aktif masyarakat. Warga pun menunjukkan antusiasme tinggi terhadap pembangunan tersebut, terutama karena dampak positif yang diharapkan, seperti peningkatan aksesibilitas dan efisiensi transportasi.

Kejelasan informasi dalam komunikasi sangat menentukan suksesnya implementasi pembangunan jalan desa. Informasi yang jelas dan sistematis memudahkan pengambilan keputusan, membangun kepercayaan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Hasil wawancara dengan BPD menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat mencakup rencana pembangunan, lokasi, panjang, lebar jalan, serta manfaatnya. Warga yang hadir dalam musyawarah desa menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap pembangunan jalan, karena mereka merasa lebih terlibat dalam prosesnya. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa kejelasan informasi tidak hanya memperkuat akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, yang menjadi kunci keberhasilan proyek tersebut.



Keberhasilan implementasi kebijakan, khususnya dalam pembangunan jalan desa, sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai. Sumber daya yang dimaksud mencakup dua aspek utama, yaitu sumber daya manusia dan anggaran. Edward III dalam Widodo (2010:98) menekankan bahwa sumber daya manusia dan anggaran adalah faktor kunci dalam kelancaran pelaksanaan kebijakan. Dalam penelitian ini, sumber daya manusia yang terlibat dalam proyek pembangunan jalan di Desa Paan Waru dapat dikatakan cukup memadai. Warga desa menunjukkan partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan, seperti kerja bakti dan pembersihan jalur proyek, yang meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang ada. Sebagai contoh, Bapak Marce, salah seorang warga, menyatakan bahwa mereka turut membersihkan jalur proyek sebagai kontribusi nyata terhadap kelancaran pembangunan jalan. Meskipun demikian, pandemi Covid-19 memberikan hambatan signifikan dalam partisipasi masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Maksimilianus Ndo, yang menjelaskan bahwa pembatasan aktivitas kerumunan mengurangi keterlibatan masyarakat dalam kerja bakti.

Selain sumber daya manusia, anggaran juga memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan proyek. Dalam penelitian ini, anggaran pembangunan jalan berasal dari APBDes yang dialokasikan sebesar Rp 485.734.000. Namun, akibat pandemi Covid-19, sebagian dana tersebut dialihkan untuk bantuan langsung tunai (BLT), sehingga anggaran yang tersedia tidak memadai untuk menyelesaikan proyek sesuai rencana. Bapak Siprianus Boneng, Kepala Desa, menjelaskan bahwa dana tersebut awalnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, termasuk jalan, dengan tujuan utama untuk mempermudah akses masyarakat ke layanan kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. Meskipun pengalihan anggaran ini dapat dimaklumi sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak di tengah pandemi, hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran dapat mempengaruhi kelancaran proyek.

Hasil wawancara dengan Bapak Sabianus Alniwar Sele, dijelaskan bahwa meskipun pembangunan jalan desa dimulai dengan baik, pandemi Covid-19 memaksa pemerintah desa untuk menghentikan sementara proyek tersebut dan mengalihkan anggaran untuk kebutuhan sosial. Keputusan ini, meskipun menunda pelaksanaan proyek jalan, diambil demi keselamatan dan kesejahteraan warga. Hal ini menggarisbawahi bahwa ketidakpastian eksternal seperti pandemi dapat mempengaruhi ketersediaan anggaran dan keputusan yang diambil dalam pengelolaan proyek. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam keberhasilan pembangunan jalan desa, dan pentingnya perencanaan yang komprehensif serta strategi mitigasi risiko untuk mengatasi hambatan seperti krisis kesehatan atau keadaan darurat lainnya.

Disposisi, menurut George C. Edward III, merujuk pada sikap atau kemauan pelaksana kebijakan yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam pembangunan jalan desa, disposisi positif ditandai dengan pemahaman yang mendalam mengenai tujuan dan mekanisme program, serta proaktivitas dalam mengatasi hambatan yang muncul. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan komitmen dalam pelaksanaan pembangunan jalan di Desa Paan Waru kurang berjalan dengan baik. Meskipun masyarakat dan pemerintah terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, hambatan seperti pandemi Covid-19 mengganggu kelancaran proyek. Bapak Siprianus Boneng, Kepala Desa, menjelaskan bahwa meskipun mereka telah mengikuti prosedur dan



---

melibatkan masyarakat, pembangunan jalan dihentikan sementara karena anggaran dialihkan untuk bantuan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pemahaman mengenai pentingnya proyek, komitmen untuk menyelesaikannya terhambat oleh situasi darurat.

Bapak Hironimus Sulung, seorang tokoh masyarakat, juga menekankan pentingnya komitmen jangka panjang dalam pelaksanaan proyek ini. Meskipun pengambilan keputusan pembangunan jalan sudah transparan, masyarakat menganggap perlu adanya pengawasan dan jaminan keberlanjutan proyek. Wawancara ini mengindikasikan bahwa meskipun transparansi dalam pengambilan keputusan telah terbangun, masih ada kekurangan dalam menjaga keberlanjutan proyek dan memastikan pelaksanaan berjalan sesuai rencana. Oleh karena itu, untuk memastikan proyek ini sukses, evaluasi dan peningkatan dalam strategi pelaksanaan sangat diperlukan, terutama dalam hal komitmen dan pengawasan.

Mengenai pelaksanaan tanggung jawab pelaksana, Bapak Siprianus Boneng mengungkapkan bahwa pandemi Covid-19 memaksa mereka untuk menghentikan pembangunan jalan sementara waktu dan mengalihkan dana untuk bantuan sosial. Meskipun proyek jalan terhambat, Pemerintah Desa tetap menjalankan tanggung jawabnya dengan memberikan bantuan sembako kepada warga terdampak. Bapak Darius Moma dan Bapak Ono Riberu, sebagai warga desa, juga mengungkapkan bahwa bantuan tersebut sangat membantu mereka menghadapi kesulitan ekonomi akibat pandemi. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun proyek pembangunan jalan tidak dapat dilanjutkan, Pemerintah Desa tetap memenuhi tanggung jawab sosialnya, melindungi kesejahteraan warga, dan memastikan bahwa bantuan sosial diterima dengan baik. Namun, hal ini juga menyoroti pentingnya perencanaan yang matang dan strategi mitigasi risiko agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan sambil memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat.

Struktur birokrasi yang efektif memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, terutama dalam pembangunan jalan desa. Struktur yang jelas dengan pembagian tugas yang tepat memudahkan koordinasi antar pelaksana dan memastikan proyek dapat berjalan sesuai rencana. Dalam penelitian ini, hasil menunjukkan bahwa pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pembangunan jalan di Desa Paan Waru telah dilaksanakan dengan baik. Pemerintah desa bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengawasan umum, sementara kontraktor mengelola pelaksanaan sesuai spesifikasi. Masyarakat juga berperan aktif dalam merawat jalan yang telah dibangun. Kepala Desa, Bapak Siprianus Boneng, menegaskan bahwa dalam memilih kontraktor, mereka mengutamakan rekam jejak yang baik dan pengawasan berkala untuk menjamin kualitas pembangunan jalan. Masyarakat, melalui Ibu Santi, juga memberikan masukan terkait pentingnya drainase untuk mencegah kerusakan jalan akibat hujan, yang menunjukkan adanya partisipasi aktif dalam proses evaluasi dan pemeliharaan infrastruktur.

Mekanisme pelaksanaan program pembangunan jalan di Desa Paan Waru berjalan dengan efektif dan efisien. Pemerintah desa telah melakukan perencanaan yang matang dengan melibatkan studi kelayakan, anggaran realistis, serta pengawasan ketat selama pelaksanaan proyek. Bapak Yasin, sebagai perwakilan pemerintah desa, menjelaskan bahwa pengawasan yang ketat dilakukan untuk memastikan kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai rencana, serta melakukan evaluasi untuk mengukur efektivitas proyek. Masyarakat juga berpartisipasi aktif



dalam memberikan masukan dan memantau perkembangan pembangunan, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Jhoni Ndiwa yang merasa puas dengan hasil pembangunan namun menyarankan agar ada sosialisasi mengenai pemeliharaan jalan. Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan yang terstruktur dan partisipasi masyarakat sangat berperan dalam kelancaran dan keberhasilan pembangunan jalan desa.

Koordinasi antar pelaksana merupakan faktor kunci dalam memastikan pembangunan jalan berjalan lancar. Dalam penelitian ini, koordinasi yang efektif tercermin dari pembagian tugas yang jelas antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab atas pengawasan proyek, sementara masyarakat dilibatkan dalam evaluasi dan pemberian masukan. Bapak Siprianus Boneng mengungkapkan bahwa masyarakat diberi peran dalam memantau hambatan yang muncul selama pembangunan dan memberikan masukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Ibu Santi juga menyatakan bahwa masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pembangunan dan memberikan masukan apabila menemukan hambatan. Koordinasi yang baik, komunikasi yang efektif, dan perencanaan terintegrasi antara pemerintah dan masyarakat ini menciptakan kerja sama yang sinergis dan partisipatif, yang memastikan pembangunan jalan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara serta analisis hasil penelitian terhadap Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Desa Paan Waru Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa melibatkan masyarakat dalam musyawarah untuk membahas pembangunan jalan yang menunjukkan komitmen transparansi dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan pembangunan infrastruktur jalan. Keberhasilan pembangunan jalan desa sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pengelolaannya yang efektif dan efisien. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan proyek menunjukkan komitmen pemerintah desa terhadap transparansi dan akuntabilitas. Keberhasilan pembangunan jalan bergantung pada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah dan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Abidin, Said Zainal., 2012. Kebijakan Publik, Salemba Humanika, Jakarta.

Adisasmita, Rahardjo., 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Graha Ilmu Yogyakarta

Agustino, Leo., 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung.

Akib, Header., & Tarigan, Antonius. 2008. Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. Jurnal Baca Agustus, Vol. 1, pp.1-19

Budiarjo, Miriam., 2013. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.



---

Dikun, Suyono., 2003. *Infrastruktur Indonesia: Sebelum, Selama, dan Pasca Krisis*, Kementerian Negara PPN/BAPPENAS, Jakarta.

Dwiyanto, Agus., 2012. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

H, Wahyono. 2006. *Pengelolaan Prasarana Umum di Kawasan Perbatasan Kota*. Jurnal Tata Loka. Vol. 8 No. 1 UNDIP.

Islamy, Irfan., 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bina Aksara, Yogyakarta.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*

Maleong, Lexy., 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya

N, Daldjoeni., 2011. *Interaksi Desa – Kota*, Rineka Cipta, Jakarta

Nugroho, Riant., 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, PT Elex Media, Jakarta.

Nurman, 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Rohman, Arif. 2009. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

Sadono, Sukirno., 2011. *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta, Kencana

Subarsono, A., 2011. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar.

Subarsono, Agustinus., 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelaja, Yogyakarta.

Suryono, Agus., 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*, Universitas Brawijya Press, Malang.

Winarno, Budi., 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*, CAPS, Yogyakarta.

Sumber Jurnal dan Skripsi

Aryananda, Rizki., (2020). *Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Alokasi Dana Desa Pulau Kijang Kecamatan Reteh kabupaten Inhil Provinsi Riau*. Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Murba., (2017). *Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Erencinnong Kecamatan Botoncani Kabupaten Bone*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.



---

Santoso, Ruth Stephany., (2018). Implementasi Program Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Pujon Kidul, Kabupayen Malang). Universitas Bramawijaya Malang.

Sinaga, A. H.B., & Jamaluddin, Y. (2023). Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Sardeng Tahun 2021. Ajudan (Vol.1 No.1)

Rorimpandey, M. Cindy., (2019). Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) di Desa Lopana Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

### **Sumber Internet**

<https://digilibadmin.unismuh.ac.id>